

Kemenag Pasuruan Optimalkan Anggaran Pendidikan 2026

Muhammad haris - PASURUAN.WARTAWAN.ORG

Feb 23, 2026 - 15:15



Pasuruan. Memulai lembaran kerja tahun 2026, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasuruan mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan. Giat yang mengusung tema "Bedah DIPA dan Pendampingan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)" ini, diselenggarakan di Minihall kantor setempat pada Rabu, 4 Februari 2026.

Acara ini secara khusus mengundang para pengambil kebijakan teknis dari seluruh Satuan Kerja (Satker) madrasah negeri, mencakup jenjang MIN, MTsN,

hingga MAN yang tersebar di Kabupaten Pasuruan. Kehadiran Kepala Tata Usaha, Bendahara, dan Operator madrasah menjadi bukti komitmen mereka dalam menyelaraskan alokasi anggaran dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun mendatang.

Lebih dari sekadar rangkaian administrasi tahunan, sesi "Bedah DIPA" ini menempatkan fokus utama pada pencapaian anggaran yang benar-benar memberikan dampak positif. Tujuannya adalah memastikan setiap alokasi dana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pembinaan keagamaan bagi masyarakat.

Proses penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan rencana aksi yang berlangsung di Minihall ini menjadi krusial. Langkah ini dirancang untuk memberikan peta jalan yang jelas, transparan, dan akuntabel bagi setiap satker. Dengan perencanaan yang matang sejak dini, diharapkan penyerapan anggaran negara tidak hanya tercapai secara kuantitas, tetapi yang lebih penting, tepat sasaran secara kualitas.

"Langkah ini penting agar seluruh madrasah negeri di bawah naungan Kemenag Kabupaten Pasuruan dapat mencapai target kinerja secara maksimal. Kita ingin anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat nyata bagi umat," demikian kutipan dari keterangan resmi Inmas dalam laporan kegiatan tersebut.

Melalui pendampingan yang intensif ini, Kemenag Kabupaten Pasuruan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan. Semangat transformasi birokrasi yang lebih responsif dan berdampak nyata bagi masyarakat menjadi landasan utama dalam setiap langkah yang diambil.